

SKRIPSI

DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

FARAH KAMILAH MUMTAZ

A011191182



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh :

FARAH KAMILAH MUMTAZ

A011191182



Kepada :

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh:

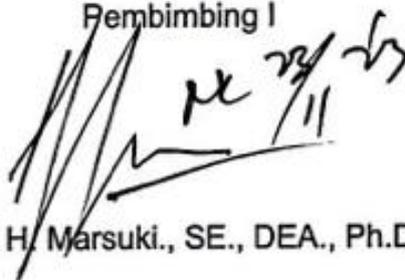
FARAH KAMILAH MUMTAZ

A011191182

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 14 November 2023

Pembimbing I



Prof. H. Marsuki., SE., DEA., Ph.D
NIP. 19600626 198803 1 002

Pembimbing II



Dr. Amanus Khalifah Fil'Arady
Yunus, S.E., M.Si
NIP. 19880113 201504 1 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Sabir, SE, M.Si CWM®
NIP. 19740715 2000212 1 003

SKRIPSI

DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh :

FARAH KAMILAH MUMTAZ

A0111911182

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Pada tanggal 14 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Marsuki, SE., DEA., Ph.D	Ketua	1.....
2.	Dr. Amanus Khalifah Fil'Arady Yunus, S.E., M.Si	Sekretaris	2.....
3.	Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®	Anggota	3.....
4.	Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si., CSF	Anggota	4.....

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



NIP 19740715 20002 12 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Farah Kamilah Mumtaz

Nomor Pokok : A011191182

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul *Determinan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan* adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 November 2023

Yang menyatakan



(Farah Kamilah Mumtaz)

A011191182

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Determinan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan". Tak lupa shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diajukan untuk menyelesaikan program sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan serta masukan dan saran dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam penulisan Skripsi ini, Penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis dapatkan. Penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca terhadap penyusunan skripsi ini untuk kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan ilmu pengetahuan yang baru untuk kita semua. Amin

Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak motivasi, dukungan serta bantuan oleh beberapa pihak terkait. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga secara khusus kepada mereka, diantaranya sebagai berikut:

1. Syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt. Atas berkat limpahan petunjuk dan karunia-Nya yang memberikan penulis kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kepada kedua orang tua penulis, bapak Arifuddin dan ibu Asmah, serta kakak kandung saya Farhan. Terima kasih telah memberikan nasehat, dukungan, serta doa yang membuat saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kepada Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM® selaku ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Dr. Fitriwati Djam'an, S.E., M.Si. selaku sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Kepada Bapak Prof. H. Marsuki., SE., DEA., Ph.D dan Bapak Dr. Amanus Khalifah Fil'Ardy Yunus, S.E., M.Si sebagai dosen pembimbing pertama dan kedua yang telah membimbing penulis dengan sabar agar penulis dapat mewujudkan skripsi ini sampai ke tahap sekarang yaitu dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, telah memberikan waktu dan tenaganya dalam memberikan nasehat serta perbaikan dalam kepenulisan skripsi ini agar lebih baik lagi.
5. Kepada Bapak Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM® dan Bapak Dr. Bakhtiar Mustari, M.Si., CSF. sebagai dosen penguji pertama dan kedua saya yang telah memberikan banyak saran, arahan, komentar, serta kritikan yang membangun pada ujian seminar.

6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, nasehat dan arahan selama proses menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
7. Kepada seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang senantiasa memberikan segala bantuan selama proses perkuliahan dan pengumpulan berkas administrasi lainnya.
8. Kepada pemilik NIM A011171524 yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih selalu ada dalam suka maupun duka serta senantiasa sabar meluangkan waktu, tenaga dan memberi dukungan yang sangat luar biasa bagi penulis. Terima kasih telah menjadi sosok rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan.
9. Kepada Parlong (kk tamy, dewdew, nuye, febay, dila, pina, kk ayuk, tiana, dan cece). Terima kasih untuk beberapa tahun ini telah mewarnai dan kebersamai penulis serta membantu dalam segala hal selama masa perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat saya Zaqia, Uppa, Bule, Jian, Azizah, Asih, dan Angel. Terima kasih telah menjadi sahabat yang baik dan tidak hentinya memberi dukungan, saran serta siap membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis selama masa perkuliahan hingga proses pengerjaan skripsi ini.
11. Kepada Nunung Hariani Akmar dan seluruh teman-teman KKN Gel.108 Desa Baruga yang telah memberikan banyak pengalaman dan kesan yang berharga serta selalu memberi support kepada penulis.

12. Kepada teman-teman angkatan GRIFFINS baik KEMA dan NON-KEMA terima kasih untuk semua momen kebersamaan yang telah dilewati selama masa perkuliahan.

13. Kepada keluarga besar HIMAJIE yang telah menjadi wadah untuk belajar, berproses dan memberikan warna untuk saya pribadi di masa perkuliahan.

Akhir kata, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam melakukan penulisan skripsi ini dan senantiasa mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. dan diberi balasan dengan sebaik-baik balasan dan senantiasa melimpahkan ridho dan berkah-Nya atas amalan serta kebaikan kita semua dan menjadikan kita sebagai golongan orang yang dimasukkan ke dalam surga-Nya. Aamiin Yaa Robbal Aalamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 12 Oktober 2023

Farah Kamilah Mumtaz

ABSTRAK

DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Farah Kamilah Mumtaz

Marsuki

Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di 4 kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2012-2021. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan data panel yang merupakan gabungan data time series dan cross section. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, sedangkan Inflasi menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di 4 kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Tingkat Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi.

ABSTRACT

DETERMINANTS OF POVERTY RATE IN SOUTH SULAWESI PROVINCE

Farah Kamilah Mumtaz

Marsuki

Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus

This study aims to analyze the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP), Open Unemployment Rate and Inflation on Poverty Rate in 4 districts/cities in South Sulawesi province from 2012-2021. This study used multiple linear regression analysis using panel data which is a combination of time series and cross section data. The results of this study show that the Gross Regional Domestic Product has an insignificant negative influence on the Poverty Rate and the Open Unemployment Rate has a negative and significant influence on the Poverty Rate, while Inflation shows an insignificant influence on the Poverty Rate in 4 districts/cities of South Sulawesi Province.

Keywords: *Poverty Rate, Gross Regional Domestic Product, Open Unemployment Rate, and Inflation.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Kemiskinan	10
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	13
2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka	15
2.1.4 Inflasi	18
2.2 Hubungan Antar Variabel	21
2.2.1 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan	21
2.2.2 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan	22
2.2.3 Pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan	24
2.3 Studi Empiris	25
2.4 Kerangka Pikir Penelitian	27
2.5 Hipotesis Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN	29

3.1 Ruang Lingkup Penelitian	29
3.2 Jenis dan Sumber Data	29
3.3 Metode Pengumpulan Data	30
3.4 Metode Analisis Data	30
3.5 Pengujian Statistik	31
3.5.1 Uji Parsial (Uji t)	31
3.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)	31
3.5.3 Uji Simultan (Uji F)	32
3.6 Definisi Operasional Variabel	32
3.6.1 Variabel Dependen	32
3.6.2 Variabel Independen	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian	37
4.2 Perkembangan Variabel Penelitian	38
4.2.1 Perkembangan Data Tingkat Kemiskinan di 4 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2021	38
4.2.2 Perkembangan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK di 4 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2021	39
4.2.3 Perkembangan Data Tingkat Pengangguran Terbuka di 4 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2021	40
4.2.4 Perkembangan Data Inflasi di 4 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2021	41
4.3 Hasil Estimasi Data	42
4.3.1 Uji Parsial (Uji t)	44
4.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	45
4.3.3 Uji Simultan (Uji F)	45
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	46
4.4.1 Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan	46
4.4.2 Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan	48
4.4.3 Analisis Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan	49
BAB V PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	53

DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Estimasi Regresi	43
Tabel 4.2 Hasil Uji R^2	45
Tabel 4.3 Hasil Uji F	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2021	4
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	27
Gambar 4.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Periode 2012-2021	38
Gambar 4.2 Perkembangan PDRB ADHK Periode 2012-2021	39
Gambar 4.3 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Periode 2012-2021	41
Gambar 4.4 Perkembangan Inflasi Periode 2012-2021	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang selalu dihadapi seluruh negara di dunia, terutama di negara-negara berkembang. Masalah utama yang membuat negara berkembang sulit untuk maju adalah terjadinya kesenjangan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan yang diperoleh seseorang berpenghasilan tinggi dan rendah sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat, pendapatan nasional rendah dan orang yang hidup dibawah garis kemiskinan meningkat (Kumalasari, 2011).

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995).

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan, yaitu tingkat upah yang masih dibawah standar, tingkat pengangguran yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lambat, inflasi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Seseorang dikatakan miskin bila

dia belum bisa mencukupi kebutuhannya atau belum berpenghasilan. Semua ukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen yaitu, (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya; dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Ravi Dwijayanto, 2010). Bagian pertama relatif jelas. Biaya untuk mendapatkan kalori minimum dan kebutuhan lain dihitung dengan melihat harga-harga makanan yang menjadi menu makanan golongan kaum miskin. Adapun elemen kedua sifatnya lebih subjektif.

Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

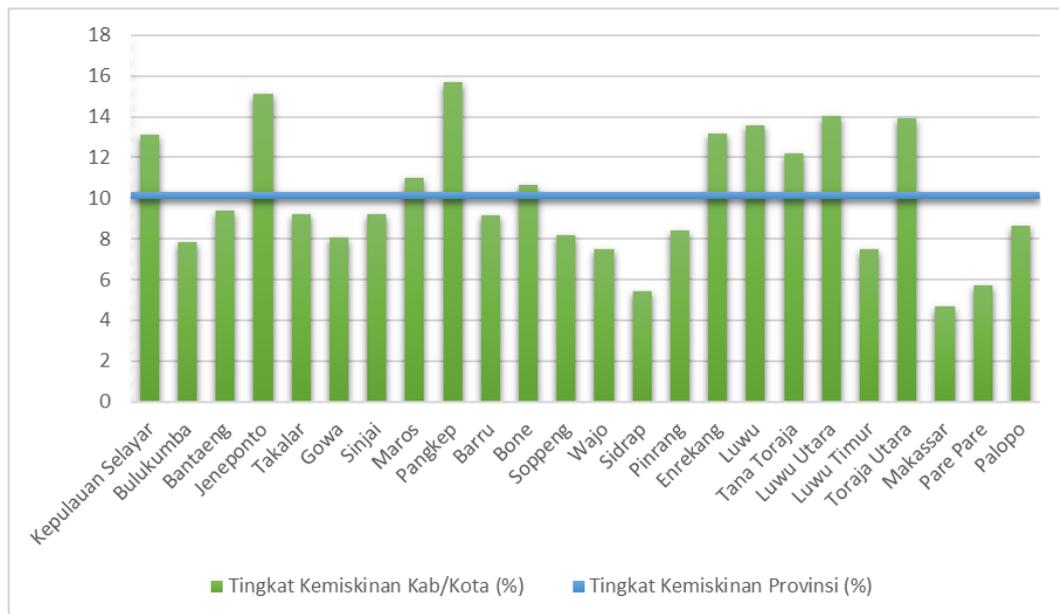
Proses ini berlangsung secara timbal balik dan saling terkait, yang pada akhirnya secara akumulatif memperlemah masyarakat miskin. Masalah ini jika tidak segera di tanggulangi akan memperparah kondisi masyarakat miskin, yang berdampak pada lemahnya etos kerja, rendahnya daya perlawanan terhadap berbagai persoalan hidup, kebiasaan-kebiasaan buruk yang terpaksa mereka lakukan sebagai jalan pintas untuk mempertahankan hidup mereka, apabila keadaan ini berkelanjutan, maka akan melahirkan budaya kemiskinan untuk diberantas yang sulit.

Dalam sebuah upaya pembangunan yang dilakukan, tidak jarang hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan pembangunan yang dilaksanakan hanya untuk mencapai pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang tinggi tanpa memperhatikan faktor yang lain, sehingga permasalahan yang timbul akibat kesalahan upaya pembangunan yang dilakukan yaitu tingkat kemiskinan yang tinggi, distribusi pendapatan yang tidak merata yang berdampak pada kesenjangan sosial dan ekonomi yang terlalu besar serta permasalahan produk domestik bruto itu sendiri (Widodo, 2006).

Kondisi di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan di mana pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata juga diiringi dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih terus menghadapi permasalahan kemiskinan. Meski menjadi salah satu provinsi yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan masih tergolong cukup tinggi.

Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan hingga akhir Desember 2021, penduduk dengan keadaan miskin di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 784,98 jiwa. Sejak tahun 2012 hingga 2021, penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan terbilang kecil. Pada tahun 2012 persentase tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan berada di angka 10,58 persen dan di tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi sebesar 11,30 persen. Namun, pada tahun 2014 kembali menurun menjadi 10,44 persen. Kemudian, di tahun 2015 menjadi 10,45 persen. Masuk pada tahun 2016 menurun lagi menjadi 10,23 persen dan terus menurun hingga pada tahun 2021

mencapai 9,08 persen. Dengan kata lain, dari 2012 hingga 2021 persentase penurunannya hanya 1,5 persen. Yang di mana angka tersebut jauh di bawah provinsi lain. Berikut ini data tingkat kemiskinan Kab/Kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2012 – 2021:



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.1 Data Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2021

Berdasarkan gambar 1.1 di atas memperlihatkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2012 hingga tahun 2021 cenderung menurun selama 10 tahun terakhir. Meskipun tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan tersebut menunjukkan penurunan, namun hal ini sepenuhnya tidak bisa dijadikan ukuran bahwa Sulawesi Selatan berhasil dalam mengentaskan masyarakatnya dari jeritan kemiskinan yang pada kenyataannya kemiskinan masih ada sampai saat ini dan berarti bahwa penanganan kemiskinan tidak mudah diatasi dalam jangka pendek.

Kedalaman masalah kemiskinan dan keterbelakangan yang melekat pada sejumlah besar masyarakat kita, menuntut perlunya upaya-upaya yang dapat mempengaruhi perilaku pembentuk sistem dan tata nilai kemasyarakatan, bukan sekadar yang menyentuh arus atas kehidupan saja. Masalah ini artinya tidak bisa ditangani hanya sebagai fenomena ekonomi juga tidak bisa dipandang sebagai urusan pemerintah dengan program pembangunan yang ada.

Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan ini merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari isu-isu yang berkaitan langsung dengan kemiskinan yaitu tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia dan lainnya (World bank, 2004).

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan sangatlah serius, hal tersebut dapat dilihat dari segi banyaknya program yang dijalankan pemerintah. Terdapat banyak variabel makro ekonomi yang dapat dijadikan sebagai penyebab meningkat atau menurunnya kemiskinan yang ada pada suatu daerah (Walida, Agussalim & Undai, 2015). Pemerintah sendiri selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ke tahun. Namun pada kenyataannya jumlah penduduk miskin tidak juga mengalami penurunan yang signifikan, malahan kondisinya semakin memprihatinkan tiap tahunnya.

Kemiskinan secara makro dapat ditentukan oleh tinggi rendahnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. PDRB suatu wilayah yang tinggi menandakan wilayah tersebut memiliki perekonomian yang baik. Sebaliknya,

PDRB suatu wilayah yang rendah menandakan perekonomian wilayah tersebut tidaklah dalam keadaan baik. Perekonomian yang dimaksud yaitu perekonomian yang dapat menunjang kehidupan masyarakat sehingga tidak terjadi kemiskinan. PDRB suatu wilayah tinggi apabila wilayah tersebut dapat mengoptimalkan potensi wilayahnya sendiri dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang memadai (Damanik, 2020).

PDRB yang tinggi akan menekan tingkat kemiskinan, karena dengan tingginya PDRB pembangunan dapat dioptimalkan, sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, PDRB yang rendah akan meningkatkan jumlah kemiskinan dalam masyarakat, karena pembangunan yang dilakukan dalam menyejahterakan masyarakat tidak optimal. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Besarnya angka PDRB dianggap mampu memberikan kontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin disuatu daerah.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kemiskinan adalah tingkat pengangguran. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, maka akan menimbulkan efek yang buruk juga kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek ekonomi dalam jangka panjang (Sukirno, 2002).

Pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Standar hidup yang rendah dimanifestasikan secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, bekal pendidikan yang minim, atau bahkan tidak ada sama sekali, angka kematian bayi yang tinggi, usia harapan hidup yang relative sangat singkat dan peluang mendapatkan kerja yang rendah (Todaro, 2003).

Kemudian, inflasi juga menjadi faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Inflasi merupakan salah satu indikator perekonomian yang penting, laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar supaya tidak menimbulkan penyakit makroekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian. Inflasi memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian. Apabila perekonomian suatu negara mengalami suatu kelesuan maka Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter yang ekspansif dengan cara menurunkan tingkat suku bunga.

Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus, dan berakibat pada makin tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Karena semakin tinggi tingkat inflasi maka masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan adanya harga barang dan jasa yang tinggi dia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehingga menimbulkan kemiskinan (Susanto dan Pangesti, 2021).

Permasalahan kemiskinan ini merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan

harus dilakukan secara komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, dkk 2008). Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat sebagai pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat mengungkapkan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Bagi Mahasiswa, sebagai acuan dan dapat memahami permasalahan kemiskinan secara benar, sehingga dapat mengatasi permasalahan perekonomian yang ada di Sulawesi Selatan.
2. Bagi masyarakat, untuk menambah pengetahuan agar dapat memahami hubungan antara Kemiskinan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengangguran, dan Inflasi.
3. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan sehingga dapat menuntaskan permasalahan kemiskinan di Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu masalah krusial yang hampir dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak lebih jauh. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*proverty line*) atau disebut juga batas kemiskinan (*poverty treshold*).

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara (Yacoub, 2012). Menurut (World Bank, 2004) salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Keynes (1936) mengatakan bahwa masalah kemiskinan muncul karena adanya paradoks masalah ekonomi bernama "*poverty in the midst of plenty*" yang artinya kemiskinan di tengah kelimpahan, dimana memungkinkan terjadinya ketidakstabilan endogen dan melihat bahwa fungsi tak terkekang tenaga kerja dan pasar modal menanamkan kuat kecenderungan kliring pasar. Penekanan Keynes pada ketidakmampuan dari sistem untuk membuat penyesuaian otomatis menjadi penyebab ketidakseimbangan antara konsumsi masyarakat dan produksi permintaan masyarakat sehingga memunculkan ketimpangan yang mendorong kelompok terpinggirkan (Rima, 2001).

Pada aliran Keynesian, program kesejahteraan dan *Welfare State* sangat mementingkan campur tangan pemerintah, hal ini dikarenakan peran pemerintah dalam mengatur serta mengarahkan kegiatan ekonomi baik dari skala kecil seperti individu-individu hingga skala menengah dan besar seperti firma-firma dalam memberikan subsidi pendapatan untuk menunjang kesejahteraan warga negaranya terbilang cukup besar. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa aliran ini melihat kesejahteraan sebagai sebuah bentuk timbal-balik atau sebab-akibat, dimana penentangan terhadap globalisasi merupakan akibat dari adanya ketimpangan pendistribusian pendapatan yang menyebabkan terjadinya liberalisasi perdagangan. Hal ini berarti kesenjangan pendapatan semakin melebar sehingga menimbulkan ketimpangan standar hidup yang melahirkan kelompok terpinggirkan (negara berkembang) dan secara ekonomi akan tertindas dan bergerak menghantam arus globalisasi (Krugman, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau

sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dari tindakan kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Menurut BPS kemiskinan dapat diukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Todaro (2003) mendefinisikan kemiskinan menjadi dua, yaitu: 1) kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mereka hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau dibawah "garis kemiskinan internasional", garis tersebut tidak mengenal tapal batas antar negara, dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang dengan pendapatan US\$1 atau \$2 per hari dalam dolar paritas daya beli (PPP), dan 2) kemiskinan relatif adalah suatu

ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai dari seluruh produksi nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah, dalam kurun waktu tertentu, biasanya tiap tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi, baik berupa barang dan jasa dalam suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto terdiri dari dua macam cara penyajian, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau PDRB nominal merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan (*current price*), baik pada saat menghitung atau menilai produksi, biaya antara, ataupun nilai tambah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan atau dikenal juga dengan PDRB riil merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu yang digunakan sebagai acuan atau tahun dasar, baik pada saat menghitung atau menilai produksi, biaya antara, maupun komponen nilai tambah.

Nanga (2005) menyatakan bahwa PDRB adalah total nilai atau harga pasar (*marketplace*) dari seluruh barang dan jasa akhir (*final goods and service*) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu. kemudian, Sukirno (2006) menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi adalah

kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil yang pengukurannya tidak hanya berdasarkan jumlah PDRB secara keseluruhan, namun juga memperlihatkan distribusi pendapatan menyebar yang telah menyebar ke seluruh lapisan dalam masyarakat.

PDRB merupakan merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yaitu suatu proses kenaikan output nasional suatu periode tertentu terhadap periode sebelumnya. Dalam perkembangannya terdapat banyak teori mengenai pertumbuhan ekonomi, antara lain: pertama, teori pertumbuhan klasik menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan. Kedua, teori schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha didalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Ketiga, teori pertumbuhan Neo-Klasik yang di mana melalui kajian empirikal teori ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2006:432).

Keempat, teori pertumbuhan Keynes mengemukakan bahwa aggregate demand (AD) merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi yang merupakan permintaan disertai keahlian membayar permintaan jasa dan barang di dalam perekonomian. Permintaan jasa dan barang dalam aggregate demand (AD) dikendalikan oleh konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor (perekonomian terbuka). Teori Keynes sangat mengutamakan sisi

permintaan agregat. Keynes dalam teorinya berpendapat investasi dapat menjadi jembatan penengah atau solusi alternatif apabila terjadi ketidakseimbangan antara konsumsi dan pendapatan akibat dari permintaan efektif yang tidak tercapai, sebab efek multiplier yang terdapat dalam peningkatan investasi akan turut serta meningkatkan pendapatan (Krugman, 2018)

Tinggi rendahnya angka PDRB suatu daerah ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut dalam mengelola sumberdaya daerahnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Permana (2012) yang menyatakan bahwa besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung pada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Dalam menghitung PDRB suatu daerah dapat menggunakan tiga pendekatan, antarlain: pendekatan produksi, Pendekatan Pengeluaran, dan Pendekatan pendapatan. Secara teoritis, total PDRB yang dihitung melalui ke tiga pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar. Penghitungan PDRB melalui pendekatan produksi dan atau pendekatan pendapatan akan disajikan dalam bentuk data PDRB menurut lapangan usaha, sedangkan melalui pendekatan pengeluaran disajikan dalam bentuk data PDRB menurut Penggunaan. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara umum pengangguran adalah orang yang belum memiliki pekerjaan tetap atau angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Semakin tinggi angka pengangguran, maka hal ini menunjukkan bahwa kondisi penduduk yang kurang baik, karena tidak semua angkatan kerja telah memperoleh pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi juga menunjukkan bahwa penduduk

tersebut hanya berfungsi sebagai konsumen tetapi tidak berfungsi sebagai faktor input produksi yang dapat menghasilkan output. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

Pengangguran terbuka tercipta sebagai akibat penambahan pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih rendah daripada pertumbuhan tenaga kerja, akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum memulai pekerjaan.

Sedangkan tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Kegunaannya adalah memberi indikasi tentang persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran di suatu daerah atau wilayah. Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator ketenagakerjaan yang penting untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan.

Terdapat beberapa teori-teori yang menjelaskan mengenai pengangguran yang terjadi di Indonesia yaitu: pertama, teori klasik yang di mana dalam teori ini berpendapat bahwa pengangguran dapat dicegah salah satunya dengan cara penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas, agar dapat menjamin terciptanya kestabilan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam teori ini dijelaskan bahwa jika antara permintaan dan penawaran tidak stabil

seperti, terjadinya penawaran tenaga kerja yang lebih tinggi maka akan menurunkan upah, dampaknya pada perusahaan yaitu mengalami penurunan produksi. Permintaan tenaga kerja dapat meningkat ketika perusahaan dapat melakukan perluasan produksi yang terjadi pada keuntungan karena rendahnya biaya (Tohar, 2000) dalam (Qadrunnanda, 2017).

Kedua, teori Keynes yang di mana teori keynes justru berbanding terbalik dengan teori klasik. Dalam teori ini menjelaskan bahwa permintaan agregat yang rendah menimbulkan terjadinya pengangguran. Rendahnya permintaan agregat akan berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi, kemudian hal ini akan berdampak pada konsumsi yang rendah. Menurut teori keynes, kondisi ini tidak bisa dilimpahkan ke mekanisme di pasar bebas, karena saat tenaga kerja mengalami peningkatan, maka akan mengalami penurunan upah sehingga terjadinya kerugian, bahwa upah yang turun berdampak pada daya beli masyarakat yang akan turun juga, hal ini menimbulkan tidak bisa menyerap tenaga kerja karena produsen yang mengalami kerugian.

Ketiga, teori kependudukan dari Malthus Dalam Teori ini dijelaskan bahwa pertumbuhan penduduk lebih cepat, sehingga akan melampaui pertumbuhan pada persediaan makanan. Malthus mengatakan pertumbuhan penduduk yang terjadi cenderung seperti "deret ukur". Secara jangka panjang kemajuan teknologi dinilai belum cukup untuk mengalihkan kondisi, pertumbuhan penduduk yang tak terbatas menimbulkan supply makanan akan terbatas. Dimasa masyarakat modern, peningkatan yang pesat pada jumlah penduduk dinilai mampu menghasilkan tenaga kerja yang banyak, namun kesempatan kerja yang ada tidak seimbang, sehingga menyebabkan persaingan dalam mencari kerja dan masyarakat yang tidak dapat bersaing akan menjadi pengangguran.

Keempat, teori sosiologi Ekonomi non-Marxian Struktur dan proses ekonomi yang dibayangkan sebagai sistem kapitalisme kompetitif yang berawal dari analisis marx. Pada zaman tersebut belum ada yang mengendalikan pasar industri kapitalis yang ada masih tergolong kecil. Akan tetapi marx tetap yakin suatu saat akan ada masa dimana kompetisi dalam industri akan berkembang pesat. Pada persaingan industri tersebut industri yang paling kuat akan menghasilkan sistem monopoli dan monopoli itu nantinya akan ada perusahaan besar yang mampu mengendalikan perusahaan dalam dan disebut sebagai perekonomian kapitalis. Dari yang sudah dijelaskan dapat dikaji bahwa adanya pergantian sistem antara kompetitif ke arah monopoli, akan mengalami keterpurukan pada suatu perusahaan jika perusahaan tersebut tidak mampu bersaing.

2.1.4 Inflasi

Menurut Boediono (2001) inflasi adalah kecenderungan dari harga yang naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas dan mengakibatkan pada sebagian besar dari harga-harga barang lain. Jika inflasi mengalami fluktuasi, maka kegiatan perekonomian akan cenderung menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Dampak dari kenaikan inflasi menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Dikarenakan nilai riil pada mata uang mengalami penurunan.

Menurut Mankiw (2006) bahwa inflasi merupakan hal yang wajar, ada variasi penting pada tingkat kenaikan harga. Publik sering memandang laju inflasi yang tinggi ini sebagai masalah utama dalam perekonomian. Menurut Nanga (2005), atas dasar besarnya laju inflasi, inflasi dapat dibagi ke dalam empat kategori, yakni: 1. Inflasi Ringan, yaitu inflasi yang masih belum

mengganggu keadaan ekonomi. Inflasi ini dapat dikendalikan karena harga-harga naik secara umum, tetapi belum mengakibatkan krisis dibidang ekonomi. Inflasi ringan nilainya dibawah 10% per tahun. 2. Inflasi Sedang, belum membahayakan kegiatan ekonomi, tetapi inflasi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang tetap. Inflasi sedang berkisar antara 10%-30% 3. Inflasi Berat, inflasi ini sudah mengacaukan kondisi perekonomian. Pada kondisi inflasi berat ini orang cenderung menyimpan barang. Orang tidak mau untuk menabung karena bunga bank lebih rendah dari laju inflasi. Inflasi ini berkisar 30%-100% per tahun. 4. Hyperinflasi, inflasi ini sudah mengacaukan perekonomian dan susah dikendalikan walaupun dengan tindakan moneter dan tindakan fiskal. Inflasi sangat berat ini nilainya diatas 100% per tahun.

Menurut Sukirno (2006) terdapat tiga kelompok mengenai inflasi yang membahas tentang aspek-aspek tertentu, tiga teori tersebut yaitu: pertama, teori kuantitas di mana inti dari teori kuantitas adalah, pertama bahwa inflasi itu hanya biasa terjadi kalau ada penambahan volume jumlah uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral. Bila terjadi kegagalan panen misalnya, yang menyebabkan harga beras naik, tetapi apabila jumlah uang beredar tidak ditambah, maka kenaikan harga beras akan berhenti dengan sendirinya; kedua, teori keynes di mana kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang dapat disediakan oleh masyarakat. Kelompok-kelompok sosial ini misalnya orang-orang pemerintah sendiri, pihak swasta atau bisa juga serikat buruh yang berusaha mendapatkan kenaikan gaji atau upah, dimana kenaikan ini akan berdampak terhadap permintaan barang dan jasa yang pada akibatnya akan menaikkan harga.

Ketiga, teori strukturalis di mana teori ini biasa disebut juga dengan teori inflasi jangka panjang, karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi. Karena struktur penambahan produksi barang-barang ini terlalu lambat dibandingkan dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat, akibatnya penawaran barang kurang dari yang dibutuhkan masyarakat, sehingga harga barang dan jasa meningkat. Teori inflasi yang sering digunakan dan cukup terkenal adalah teori kuantitas. Dalam teori kuantitas dikatakan bahwa inflasi sangat dipengaruhi jumlah uang beredar. Dalam kenyataannya jumlah uang beredar itu sangat berpengaruh terhadap inflasi.

Secara umum, inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, dimana bila inflasi itu ringan akan berpengaruh positif terhadap perekonomian, artinya bisa meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan minat masyarakat untuk menabung serta berinvestasi. Sebaliknya, pada saat terjadi inflasi yang parah yaitu pada saat terjadi inflasi yang tak terkendali (hiperinflasi) keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu, orang tidak bersemangat untuk menabung, berinvestasi dan memproduksi karena harga meningkat dengan cepat.

Menurut Sukirno (2006:333), inflasi juga dapat dilihat menurut sebabnya terbagi menjadi dua yaitu *demand-pull Inflation* dan *cost-push inflation*. *Demand-Pull Inflation* disebabkan oleh permintaan masyarakat akan barang-barang (agregat demand) bertambah. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian yang berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi.

Cost Push Inflation di mana inflasi ini biasa ditandai dengan kenaikan biaya produksi, yang disebabkan oleh terdepresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administrered price*), dan terjadi *negative suply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Inflasi ini berlaku dalam masa perekonomian berkembang pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji atau upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan mengakibatkan kenaikan harga-harga berbagai barang.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Kuznet (2001) dalam Permana (2012). Pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

Menurut penelitian Hermanto S. dan Dwi W. (2007) menyatakan bahwa ketika perekonomian berkembang di suatu wilayah (negara atau kawasan

tertentu yang lebih kecil) terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan dan memiliki distribusi pendapatan dengan baik di antara wilayah tersebut, maka akan dapat mengurangi kemiskinan. Wongdesmiwati (2009) menyebutkan bahwa penurunan kemiskinan di Indonesia dapat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti investasi melalui penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh swasta dan pemerintah, perkembangan teknologi yang semakin inovatif dan produktif, serta pertumbuhan penduduk melalui peningkatan modal manusia.

2.2.2 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan

Menurut (Arsyad, 2010) menyatakan bahwa bagi para tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, atau hanya bekerja paruh waktu selalu berada di antara kelompok masyarakat miskin. Masyarakat miskin pada umumnya menghadapi permasalahan keterbatasan kesempatan kerja serta keterbatasan modal untuk pengembangan usaha.

Pengangguran terjadi karena beberapa faktor salah satunya produktivitas yang rendah. Produktivitas rendah menyebabkan kemampuan keahlian yang dimiliki sedikit, sehingga perusahaan tidak mau menerima seseorang untuk bekerja. Ketika seseorang tidak mampu mendapatkan pekerjaan maka ia tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu semakin banyak pengangguran maka akan menambah jumlah penduduk miskin.

Menurut Sadono Sukirno (2006), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka

terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Sedangkan menurut Tambunan (2001), pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, antara lain: a) Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi income poverty rate dengan consumption poverty rate. b) Jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

Sebagaimana teori lingkaran setan kemiskinan versi nurse yang menggambarkan rendahnya produktivitas sebagai salah satu sebab kemiskinan. Pengangguran bisa diartikan sebagai tingkat produktivitas seseorang yang rendah atau bisa juga tidak melakukan produktivitas sama sekali. Hal ini karena penganggur tidak memiliki suatu pekerjaan untuk menghasilkan upah ataupun gaji. Padahal sebagian besar rumah tangga bergantung dari gaji/upah yang didapat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pengangguran ini lebih sering terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah sehingga mereka harus hidup di bawah garis kemiskinan.

2.2.3 Pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan

Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang secara umum (Nurfitri Yanti, 2011), apabila harga-harga naik secara drastis dalam periode tertentu maka tingkat kemiskinan juga akan naik. Tingkat kemiskinan naik bila masyarakat tingkat upahnya tetap, jika tingkat upahnya tetap sedangkan harga barang-barang naik, masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan, karena terjadi inflasi yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan primernya.

Teori Keynes mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat memiliki permintaan melebihi jumlah uang yang tersedia. Proses perebutan pendapatan antargolongan masyarakat masih menimbulkan permintaan agregat (keseluruhan) yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia, mengakibatkan harga secara umum naik. Dalam jangka pendek kenaikan inflasi menyebabkan pertumbuhan perekonomian, namun dalam jangka panjang tingkat inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak yang buruk.

Tingginya tingkat inflasi akan menyebabkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibanding dengan harga barang impor. Masyarakat terdorong untuk membeli barang impor yang lebih murah dibandingkan barang domestik. Harga yang lebih mahal menyebabkan turunnya daya saing produk domestik menyebabkan barang impor naik. Kurang bersaingnya barang domestik menyebabkan rendahnya permintaan terhadap produk dalam negeri. Sejumlah perusahaan akan mengurangi produksi. Produksi berkurang dan berimbas kepada pengurangan pekerja kehilangan pekerjaannya dan tidak mendapatkan penghasilan. Inflasi bagi kelompok pendapatan rendah akan mengalami penurunan daya beli uang yang dimiliki untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Uang yang dimiliki akan mengalami penurunan daya beli sehingga secara riil pendapatan orang tersebut akan mengalami penurunan seiring kenaikan inflasi (Susanto dan Pangesti, 2021).

2.3 Studi Empiris

Dalam bagian ini memuat penelitian yang telah dilakukan peneliti lain, dan permasalahan yang diangkat juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain, melalui penelitian biasa ataupun skripsi, yang mana mendasari pemikiran penulis dalam penyusunan skripsi ini, seperti oleh beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan kajian pustaka yaitu penelitian dari:

Okta Ryan (2013) dengan judul “Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2011”. Dengan metode analisis regresi linier data panel dengan metode FEM. Hasil dari penelitian ini yaitu Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Sussy Susanti (2013) “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel, Dengan melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat”. Dalam estimasi pemodelan menunjukkan bahwa secara parsial PDRB dan Pengangguran mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kemiskinan, dan IPM mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan.

Kinasih Prining Tyas dan Yenny Patnasari (2016) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Provinsi Di Indonesia Tahun 2009-2013”. Dengan metode analisis regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran dan inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan PDRB per kapita tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan provinsi di Indonesia.

Ridho Andykha et al. (2018) dengan judul “Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, Dan Ipm Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah”. Dengan metode model regresi data panel yaitu Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel laju pertumbuhan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

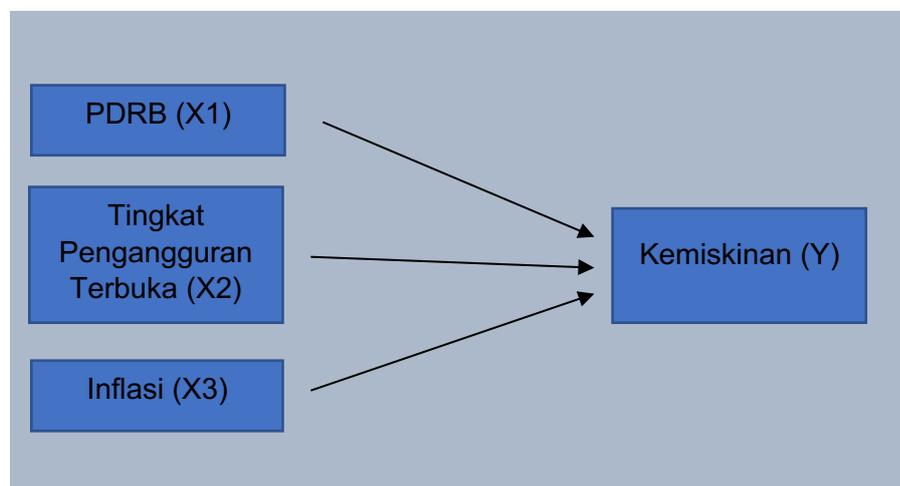
Manangkalangi, et al. (2020) dengan judul “Analisis Pengaruh PDRB Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Tengah (2000-2018)”. Dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan variabel inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Ayu Sindi Widiastuti dan Kosasih (2021) dengan judul “Pengaruh ZIS, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan

di Indonesia” dengan metode teknik Analisis Regresi Linear Berganda. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ZIS, pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menganalisis Kemiskinan di Sulawesi Selatan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi Indonesia di antara sekian banyak masalah di Indonesia, adapun faktor yang mempengaruhi tersebut di antaranya: (1) PDRB, (2) Tingkat Pengangguran Terbuka, (3) Inflasi. Variabel-variabel tersebut dimaksud akan lebih mengarahkan peneliti untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian, dimana tingkat kebenarannya masih perlu dibuktikan

atau diuji secara empiris. Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Diduga Inflasi berpengaruh positif terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.